

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai agama. Pluralisme yang bercirikan keberagaman agama, mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas keagamaan individu dan berpotensi menimbulkan konflik. Indonesia adalah contoh masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia yang multikultural tidak hanya dicirikan oleh keberagaman suku, budaya, bahasa dan etnis, namun juga dari segi agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perbedaan agama yang tidak terpelihara dengan baik dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai inti agama itu sendiri yang mengajarkan kita damai, hidup saling menghormati dan saling tolong menolong (Kristanti, 2019).

Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (sehubungan dengan sistem sosial dan politiknya). Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme yang cukup tinggi, baik dari segi bahasa, suku, bangsa, maupun agama. Bagi negara-negara yang bercirikan pluralisme dalam bidang agama, seperti Di Indonesia, ketidakamanan dan ancaman permusuhan antar warga negara atas isu agama akan muncul sewaktu-waktu jika tidak diantisipasi dengan baik. Bangsa Indonesia sangat menginginkan agar hasil-hasil kajian dan penelitian di bidang agama dapat mendukung partisipasi bersama seluruh umat beragama di Indonesia dalam memajukan dan mengupayakan kerukunan antar umat beragama (Prayogo, Simamora, & Kusuma, 2020).

Kehidupan beragama merupakan salah satu bentuk kehidupan yang pokok sosial. Setiap ajaran agama selalu mengajarkan umatnya untuk hidup damai, saling menghormati, dan saling membantu. (Octavia, Harsan, & Fatimah, 2022). Kerukunan beragama adalah fondasinya Penting dalam menciptakan keharmonisan antar masyarakat yang beragam, selain menciptakan semangat gotong royong dalam rangka mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama adalah hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai

dalam persamaan pengamalan ajaran agamanya serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Harmoni yang seharusnya dikembangkan ternyata tidak kerukunan itu sifatnya verbal tetapi itulah kerukunan yang sesungguhnya karena kerukunan seperti ini didasari oleh kesadaran bahwa meskipun berbeda-beda, setiap manusia mempunyai tanggung jawab yang sama dan terpanggil untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sehingga jika kerukunan itu hanya sebatas lisan maka tidak akan ada yang namanya kerukunan. tidak akan ada wujud nyata yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (Kristanti, 2019).

Kerukunan hidup umat beragama menjadi suatu yang penting untuk diwujudkan, sebuah kerukunan yang dilandasi kesadaran bahwa walaupun terdapat perbedaan agama tetapi setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengupayakan kesejahteraan bagi orang banyak. Dalam Peraturan bersama menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Makalew, Sambiran, & Waworundeng, 2021).

Berdasarkan latarbelakang diatas, dalam penelitian ini melihat adanya beberapa kejadian konflik ditengah masyarakat yang dilatarbelakangi akan adanya perbedaan kefahaman, aliran dan akidah terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang berada di Desa Kopen. Seringnya terjadi disinformasi, salah faham, ataupun berprasangka buruk sesama umat islam dikarenakan kurangnya interaksi antar umat dan antar ormas di masyarakat Desa Kopen menjadi salah satu hal yang memicu beberapa kejadian tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan antar organisasi massa islam dengan membentuk Forsitama (Forum Silaturahmi Takmir Masjid) Desa Kopen Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri?*.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan antar organisasi massa islam dengan membentuk Forsitama (Forum Silaturahmi Takmir Masjid) Desa Kopen Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan.

#### 2. Secara Praktis

##### a) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman dalam pengambil kebijakan serta peneliti selanjutnya sesuai dengan kepakaran dalam dibidang ini sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

##### b) Bagi Penulis

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian, sehingga apa yang diteliti dapat memberikan kemanfaatan baik untuk penulis sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya.

### **E. Definisi Konsep**

Definisi konsep dalam penelitian ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebihi konsep dan batasan dalam penulisan penelitian berikut ini, penulis berusaha untuk memberikan batasan-batasan konsep dan gagasan inovasi untuk memperjelas ruang lingkup penulisan yang menyusun garis besarnya. Dalam penelitian ini terdapat parameter yang dijadikan betasan-

batasan oleh peneliti supaya hasil yang didapatkan dapat maksimal. Adapun Batasan-batasan tersebut sebagai berikut :

1. *Facilitating contexts* (kontak pendukung)
2. *Core (roots) of conflict* (akar konflik)
3. *Fuse factor* (sumbu)
4. *Triggering factors* (pemicu).

## **F. Kajian Teori**

Penelitian ini menggunakan konsep sosial dan teori konflik sosial menurut Lewis Croser dalam Setia (2023), Dimana dalam konsep sosial, manusia yang hakikatnya sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan adanya interaksi dengan manusia lainnya. Manusia hidup dibekali dengan akal fikir, sifat, dan ego masing-masing yang dapat memberikan pengaruh kepada lingkungannya. Tidak heran apabila seseorang menggunakan ego lebihnya untuk kepentingan pribadinya dapat menimbulkan gejala atau konflik pada lingkungannya. Teori konflik sosial akan menjadi indikator dalam penyelesaian atau mencari Solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan konflik apa yang sebenarnya sedang tumbuh dilingkungan tersebut.

### **A. Konsep Sosial**

Konsep sosial yang diartikan sebagai upaya untuk memahami hakikat masyarakat memerlukan landasan pengetahuan dasar tentang kehidupan manusia sebagai suatu sistem. Landasan ini dapat diperoleh dari ilmu-ilmu sosial yang ruang lingkupnya terbatas pada manusia dalam konteks sosial. Segala bidang keilmuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, dengan segala konsep, prinsip, dan kaidahnya, dianggap sebagai masukan teoritis dalam mengkaji permasalahan kehidupan bermasyarakat guna mengatasi permasalahan tersebut dan mengembangkan kehidupan manusia saat ini (Haryanto, 2016).

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, melibatkan hubungan individu, antar kelompok manusia, dan antara individu dengan kelompok manusia. Terjadinya interaksi sosial mempunyai beberapa syarat minimal yaitu adanya komunikasi dan komunikasi sosial. Karena melalui komunikasi dan komunikasi sosial, tidak hanya bergantung pada tindakan,

tetapi juga respon terhadap tindakan tersebut, apakah negatif atau positif. Misalnya tindakan positif dapat menimbulkan kerjasama, sedangkan tindakan negatif dapat menimbulkan tindakan persaingan dan konflik, serta tindakan yang dapat merugikan interaksi sosial (Supardan, 2013).

## B. Teori Konflik Sosial

Secara umum, teori konflik menekankan karakteristik dinamis internal masyarakat: distribusi penduduk ke dalam setiap kelas sosial yang mencerminkan perbedaan akses terhadap sumber daya; Konflik kepentingan antara kelompok dan kelas sosial; Kemampuan kelompok dominan untuk mempertahankan dominasinya, baik melalui persuasi maupun paksaan terhadap kelompok lain agar menaati aturan dan memenuhi kewajibannya; Perjuangan kelompok subaltern sebagai katalis perubahan sosial. Konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi antara orang-orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Perjuangan dalam bentuknya tidak hanya dilakukan untuk mempertahankan kehidupan dan eksistensi (sehingga bersifat defensif), tetapi juga bertujuan untuk menghancurkan eksistensi orang atau kelompok lain yang dianggap sebagai lawan atau pesaing (Rahmadi, 2011).

Manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal ini mengilustrasikan lingkungan mereka melalui simbol-simbol yang diciptakan dan dikonsolidasikan melalui tradisi serta sistem budayanya. Banyak faktor yang menyebabkan konflik. Kepentingan yang berbeda memudahkan terjadinya konflik. Dalam mengejar kepentingan mereka yang berbeda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik mengenai peluang dan sarana. Konflik akan berakhir dengan kemungkinan yang berbeda-beda. Jika kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa seimbang, besar kemungkinan akan terjadi upaya kompromi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan-kekuatan yang bertikai tidak seimbang, maka akan terjadi hegemoni pihak yang kuat terhadap lawannya (Thabrani, 2022).

Suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen utama dalam waktu

## **B. Pembahasan**

Konflik terjadi dikarenakan adanya misinformasi ataupun beredarnya isu salah dikalangan masyarakat. Seperti halnya konflik keagamaan yang terjadi di Desa Kopen yang melibatkan ormas beragama. Guna menyikapi hal tersebut, untuk memberikan informasi terkait kondisi nyata yang ada dan terjadi di lapangan serta informasi terkait peran dan keterlibatan Pemerintah Desa Kopen dalam menyikapi hal hal yang terjadi dimasyarakat tentang perbedaan yang di jalan oleh umat islam di Desa Kopen.

Forum Silaturahmi Takmir Masjid adalah sebuah langkah nyata yang di inisiasi oleh tokoh-tokoh Agama dan Pengurus Ormas Islam yang ada di Desa Kopen diantaranya Ormas LDII, Ormas NU, Ormas Muhammadiyah dan Ormas MTA sebagai upaya untuk menyatukan pandangan serta membina kerukunan dalam perbedaan. Manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat dengan terbentuknya FORSITAMA ini adalah bisa menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai akidah dan aliran masing-masing dalam perbedaan dan tidak ada yang menyalahkan satu sama lain serta menjadikan Desa Kopen yang tenteram, rukun, damai daalam perbedaan.

### **a. Resolusi Konflik**

Konflik menjadi salah satu hakikat kehidupan dan perkembangan manusia serta mempunyai berbagai macam karakteristik. Manusia mempunyai ras, kelas sosial ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, dan sekte politik, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan-perbedaan tersebut telah menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan, maka perbedaan tersebut tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi. Dari sudut pandang ini, memang benar bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang disebut negara, bangsa, organisasi, dan korporasi, bahkan dalam sistem sosial terkecil sekalipun yang disebut keluarga dan persahabatan. Konflik sebagai suatu proses sosial yang terjadi antara orang-orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Perjuangan dalam bentuknya tidak hanya dilakukan untuk mempertahankan kehidupan dan eksistensi (oleh karena itu bersifat defensif), tetapi juga bertujuan untuk

menghancurkan eksistensi orang atau kelompok lain yang dianggap sebagai lawan atau pesaing.

Banyak faktor yang menyebabkan konflik. Kepentingan yang berbeda memudahkan terjadinya konflik. Dalam mengejar kepentingan mereka yang berbeda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik mengenai peluang dan sarana. Konflik akan berakhir dengan kemungkinan yang berbeda-beda. Jika kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa seimbang, besar kemungkinan akan terjadi upaya kompromi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan-kekuatan yang bertikai tidak seimbang, maka akan terjadi hegemoni pihak yang kuat terhadap lawannya. Konflik terjadi akibat ketidakcocokan komunikasi antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Untuk itu perlu adanya dialog antar masyarakat yang mengalami konflik agar dapat mengetahui dan memahami budaya orang lain, serta mengurangi stereotipe terhadap pihak lain.

Keberagaman suku, agama, suku, dan budaya Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa di satu sisi merupakan aset nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penciptaan kesejahteraan sosial. Namun di sisi lain, keadaan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kehidupan nasional apabila terjadi kesenjangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Selain itu, demokratisasi tatanan dunia yang semakin terbuka menyebabkan dinamika sosial semakin pesat, termasuk faktor intervensi asing. Situasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap konflik, khususnya konflik horizontal.

Konflik ini terbukti menimbulkan hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hilangnya nyawa, serta trauma psikologis seperti balas dendam, kebencian dan dendam yang menghambat tercapainya kesejahteraan umum. Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih berorientasi pada penanganan militer dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik masih bersifat parsial dan berupa peraturan hukum yang

dikeluarkan pemerintah seperti Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk pembentukan kerangka peraturan baru. Merujuk pada strategi pengelolaan konflik yang dikembangkan pemerintah, kerangka regulasi yang ada saat ini mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka peraturan upaya pencegahan konflik, seperti peraturan mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka peraturan kegiatan pengelolaan konflik ketika konflik terjadi, yang mencakup upaya menghentikan kekerasan dan mencegah jatuhnya korban jiwa atau harta benda. Ketiga, kerangka peraturan untuk menangani fase pasca-konflik, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas-tugas resolusi konflik/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi. Kerangka peraturan yang dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan terdapatnya beberapa Organisasi Massa Islam di Desa Kopen maka seringkali timbul permasalahan, konflik dan prasangka negatif di antara organisasi massa (ORMAS) Islam tersebut dan setelah diadakan forum silaturahmi ini bisa saling tabayun atau klarifikasi dan semua sudah terpecahkan, seperti halnya ada pemahaman bahwa masjid tempat kegiatan LDII jika dimasuki selain LDII selalu di Pel dan setelah diadakan forum ini dan ditabayunkan ternyata tidak seperti itu dan juga konflik konflik lain yang bisa dipecahkan dengan adanya forum tersebut. Pemerintah Desa Kopen bersama perwakilan Takmir Masjid se Desa Kopen bermusyawarah dan berkumpul untuk membentuk sebuah Forum Silaturahmi Takmir Masjid (FORSITAMA) Desa Kopen. Dengan terbentuknya Forum Silaturahmi Takmir Masjid (FORSITAMA) diharapkan kedepannya seluruh Organisasi Agama Islam di Desa Kopen dapat rukun kompak, kerjasama, adem ayem dan tidak terjadi konflik.

Adapun kegiatan FORSITAMA Desa Kopen antara lain :

1. Mengadakan Pertemuan rutin yang diadakan di Masjid-masjid yang berada di seluruh Desa Kopen Kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri baik di Masjid binaan NU, Muhammadiyah, LDII maupun MTA
2. Disusun Kepengurusan FORSITAMA diambil dari perwakilan ormas Islamyang berada di seluruh Desa Kopen.
3. Jika terjadi konflik diselesaikan bersama-samadengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Gambar 2. Model Poster HKI



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konflik merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan masyarakat majemuk yang notabeneanya sebagai makhluk sosial. Namun, jika konflik tanpa adanya penyelesaian juga tidak dapat dibenarkan adanya. Banyak faktor yang menyebabkan konflik. Kepentingan yang berbeda memudahkan terjadinya konflik. Dalam mengejar kepentingan mereka yang berbeda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik mengenai peluang dan sarana. Konflik akan berakhir dengan kemungkinan yang berbeda-beda. Jika kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa seimbang, besar kemungkinan akan terjadi upaya kompromi oleh kedua belah pihak. Apalagi konflik mengenai prespektif beragama, riskan untuk terjadinya perdebatan panjang dan berlarut-larut apabila tidak segera untuk diselesaikan. Seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Kopen, Pemerintah Desa Kopen memiliki tanggungjawab akan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan terbentuknya FORSITAMA tugas-tugas serta fungsi Pemerintah akan sedikit terbantu dengan terbentuknya FORSITAMA ini. Guna adanya forum tersebut adalah menciptakan situasi dan lingkungan bermasyarakat yang kondusif tanpa adanya yang bersitegang didalamnya.

#### **B. Saran**

Dalam penelitian makalah ini perlu diperhatikan bahwa peran Pemerintah dalam menyikapi masalah sosial ditengah masyarakat mempunyai peran penting dan FORSITAMA ini merupakan salah satu solusi dari masyarakat untuk masyarakat serta Pemerintah Desa Kopen yang berhasil dalam menyikapi kondisi di masyarakat. Kedepannya, diharapkan Pemerintah desa untuk lebih masif lagi memahami dan mengondisikan masyarakat desanya, untuk menanggulagi adanya kejadian serupa terjadi kembali kedepannya